DAMPAK KEBIJAKAN ORDE BARU TERHADAP PEDAGANG KECIL DI SURAKARTA

Mekar Hayuning Tyas[1], Mekar Hayuning Dyah[2], Irma Ayu Kartika Dewi[3]
[1.2.3]UIN Raden Mas Said Surakarta
mekartyas@gmail.com, aymekar05@gmail.com, Irma.ayukartikadewi@staff.uinsaid.ac.id.

Abstrak

Kebijakan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru turut mepengaruhi perkembangan aktivitas perdagangan dan keberlangsungan usaha pedagang kecil di berbagai daerah, termasuk Surakarta. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui Instruksi Presiden, antara lain Inpres Nomor 8 Tahun 1981, Inpres Nomor 7 Tahun 1982, dan Inpres Nomor 10 Tahun 1983. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyediakan tempat berjualan bagi pedagang kecil golongan ekonomi lemah serta memungkinkan tersedianya ruang usaha dengan sewa yang terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Orde Baru yang berkaitan dengan pedagang kecil serta mengkaji dampaknya terhadap perkembangan usaha dan kondisi ekonomi pedagang kecil di Surakarta pada masa Orde Baru. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian meliputi dokumen kebijakan pemerintah, arsip, surat kabar, majalah, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan perkembangan pasar dan aktivitas perdagangan di Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan dalam kegiatan ekonomi pedagang, salah satunya di Pasar Klewer, dimana pasar tersebut digunakan sebagai salah satu gambaran untuk melihat perubahan kondisi perdagangan dan pedagang kecil di Surakarta, disertai penelusuran terhadap pedagang kecil pada sektor perdagangan lainnya. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dengan perkembangan dan keberlangsungan usaha pedagang kecil di Surakarta.

Kata kunci: Orde Baru, kebijakan pemerintah, pedagang kecil, pasar tradisional, Surakarta

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Maret 1966, Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) menjadi salah satu momentum penting dalam proses peralihan kekuasaan politik di Indonesia dari Orde Lama menuju Orde Baru (Dwiki Sandy, 2020). Perubahan tersebut berlangsung dalam situasi nasional yang diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pada akhir pemerintahan Orde Lama sekitar tahun 1963-1965, Indonesia menghadapi persoalan ekonomi yang berat terutama ditandai oleh tingginya tingkat inflasi, melemahnya daya beli masyarakat, serta berbagai persoalan politik dan konflik yang berkembang di dalam negeri (Komnas HAM, 2015). kondisi tersebut turut mendorong munculnya tuntunan untuk melakukan pemulihan dan penataan kembali kehidupan nasional.

Pemerintah Orde Baru menempatkan stabilitas politik dan keamanan serta pemulihan ekonomi sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan (Puspa Unsya Shaleha, 2024). Upaya tersebut diwujudkan Pemerintahan Orde Baru di bahwa kepemimpinan Soeharto mengambil arah kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan

pemerintahan sebelumnya di bawah Soekarno melalui berbagai kebijakan yang diarahkan pada pengendalian inflasi, stabilitasasi ekonomi, peningkatan produksi serta pembangunan nasional secara bertahap. Perubahan orientasi sejak 1966 tidak hanya menandai pergeseran dalam bidang politik, tetapi juga menjadi awal dari perubahan kebijakan ekonomi yang berfokus pada stabilisasi dan rehabilitasi infrastruktur hingga mendorong investasi asing, yang kemudian memengaruhi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengusaha pribumi dan pedagang kecil (Mukhlish Yunus, dkk., 2025).

Masa transisi pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinana Soeharto melalui ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan yang menjadi pijakan bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan ekonomi (TAP MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966). Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Orde Baru mulai mengubah arah strategi pembangunan ekonomi dari kebijakan sebelumnya menuju pembangunan yang berorientasi pada stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Strategi tersebut menunjukkan kecenderungan menekankan stabilitas ekonomi, peningkatan produksi, investasi, serta keterbukaan terhadap modal dan bantuan luar negeri.

Awal pemerintahannya, Orde Baru kemudian membuka hubungan yang lebih luas dengan lembaga keuangan dan negara-negara Barat serta memberikan ruang yang lebih besar bagi bantuan dan investasi asing dengan kembali menjalin relasi dengan Bank Dunia dan IMF dengan pinjaman bilateral diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Li Atika Shulchi, 2016). Penerapan strategi pembangunan tersebut kemudian berkembang dalam pola pembangunan jangka panjang yang disusun secara terencana dan bertahap. Pemerintah memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan, sehingga proses pembangunan berlangsung dalam sistem yang relatif terpusat (Budi Rajab, 2004). Kuatnya dominasi pemerintah dalam kehidupan politik, keterlibatan militer dalam struktur pemerintahan, serta berkembangnya praktik nepotisme turut memperkuat karakter sentralistik Orde Baru. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan pembangunan lebih banyak dirumuskan dari tingkat pusat dan diterapkan ke berbagai daerah.

Upaya pemerintah Orde Baru menata kembali arah pembangunan nasional, pemerintah menyusun kerangka pembangunan yang bersifat jangka Panjang (Imam Mahdi, 2017). Pola Dasar Pembangunan Nasional kemudian menjadi landasan bagi penyusunan pola umum pembangunan jangka panjang yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah, sasaran, dan strategi pebangunan dalam rentang waktu 25 hingga 30 tahun (Rizki Rahmawati, 2022). melalui kerangka tersebut, pembangunan nasional dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dengan menetapkan berbagai target yang hendak dicapai dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pembangunan secara keseluruhan

Sebagai bentuk pelaksanaan dari perencanaan pemerintah Orde Baru memperkenalkan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita (Hotman P. Sibuea, & Dwi Seno Wijanarko, 2020). Program ini menjadi instrument utama pemerintah dalam menerjemahkan tujuan pembangunan jangka panjang ke dalam tahapan pembangunan yang lebih konret dan terukur. Setiap Repelita memiliki sasaran dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pada masanya. Pelaksanaan pembangunan melalui Repelita berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan hingga mencapai enam tahap, sehingga menjadi salah satu ciri penting dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial pada masa Orde Baru (Murdiyana, & Mulyana, 2017).

Repelita pada masa Orde Baru dilaksanakan dalam enam tahap yang memiliki sasaran berbeda tetapi saling berkaitan. Repelita I (1969-1974) diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meletakkan dasar pembangunan, dengan prioritas pada pangan, sandang, pertanian, prasarana, perumahan, serta perluasan lapangan kerja (Taufiqurokhman, 2014). Repelita II (1974-1979) melanjutkan pembangunan dengan menekankan peningkatan produksi, penyediaan pangan dan sandang, perumahan, sarana-prasarana, pemerataan kesejahteraan, serta perluasan kesempatan kerja. Repelita III (1979-1984) menitikberatkan pada pemerataan melalui delapan jalur pemerataan, termasuk pemerataan pendapatan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga pemerintah juga memberikan bantuan kepada pengusaha kecil dan masyarakat golongan ekonomi lemah (Murdiyana, & Mulyana, 2017).

Repelita IV (1984–1989) mulai menggeser prioritas pembangunan dari pertanian menuju pengembangan industri, khususnya industri padat karya, disertai upaya meningkatkan ekspor nonmigas dan daya saing industri dalam negeri. Repelita V (1989–1994) berfokus pada diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas melalui pengembangan industri serta peningkatan ekspor nonmigas, sementara sektor pertanian tetap dipertahankan sebagai salah satu sektor penting. Repelita VI (1994–1999) diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan deregulasi, mendorong ekspor nonmigas, serta membina industri menengah dan kecil, tetapi pelaksanaannya terganggu oleh krisis moneter 1997 yang kemudian berkontribusi pada berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 (Murdiyana, & Mulyana, 2017).

Perhatian pemerintah Orde Baru juga memberikan perhatian terhadap pasar dan para pedagang. memasuki tahun 1980 pemerintah mulai memberikan fokus terrhadap penyediaan tempat berdagang bagi masyarakat. Kebijakan tersebut salah satunya diwujudkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar tahun 1983/1984 (Inpres No.10 Tahun 1983). Melalui kebijakan tersebut pemerintah memberukan bantuan berupa kredit untuk mendukung pembangunan dan pemugaran pasar dengan tujuan menyediakan tempat berjualan yang layak bagi para pedagang, khususnya pedagang kecil dari golongan ekonomi lemah.

Langkah pemerintah Orba dalam merealisasikan Repelita tahap III dengan kebijakan pembangunan dan pemugaran pasar memperlihatkan adanya hubungan antara strategi pembangunan nasional dengan kehidupan ekonomi masyarakat (Arina Romarina, dkk., 2024). Pembangunan pasar dapat memberikan fasilitas dan ruang usaha yang lebih baik bagi pedagang, tetapi pada saat yang sama juga membawa perubahan terhadap pola pengelolaan, penataan, serta aktivitas perdagangan. Pedagang kecil harus menyesuaikan diri dengan aturan mengenai lokasi berjualan, penggunaan fasilitas pasar, serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pengelola pasar. Kebijakan pembangunan pasar perlu dilihat tidak hanya dari tujuan pemerintah dalam meningkatkan fasilitas perdagangan, tetapi juga dari pengalaman pedagang kecil yang secara langsung merasakan konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Pemerintah Orde Baru juga memberikan perhatian terhadap persoalan permodalan yang dihadapi pedagang kecil melalui Program Kredit Candak Kulak (KCK) (Khusnul Ashar, 2011). Program ini pada awalnya muncul dari persoalan keterbatasan modal yang dialami pedagang kecil atau bakul, khususnya di wilayah pedesaan. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui proyek perintis yang mulai dilaksanakan pada tahun 1976 dan selanjutnya diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak (Inpres No.4 Tahun 1979). Melalui KCK, pedagang kecil memperoleh akses kredit sebagai tambahan modal usaha dengan persyaratan yang relatif ringan dan disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Kebijakan ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pedagang kecil tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan ruang untuk berdagang, tetapi juga melalui upaya memperluas akses permodalan agar kegiatan usaha dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orba tersebut, sudah tentu membawa dampak terhadap para pedagang, terutama para pedagang kecil. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi dan penataan perdagangan yang diterapkan pada masa Orba mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi para pedagang kecil, terutama di Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber untuk membantu dalam penelitian, beberapa diantaranya yaitu penelitian Puspa Unsya Shaleka, dkk., yang berjudul Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru dan Pengaruh Krisis Moneter terhadap Perekonomian Indonesia. Dimana disini membahas perkembangan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru serta pengaruh krisis moneter terhadap perekonomian Indonesia. Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan arah kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru, mulai dari upaya stabilisasi ekonomi, pembangunan, keterbukaan terhadap investasi, hingga berbagai persoalan yang muncul menjelang krisis moneter 1997–1998. Pembahasan tersebut masih berada pada lingkup perkembangan kebijakan ekonomi dan kondisi perekonomian Indonesia secara umum, sehingga pengalaman kelompok masyarakat tertentu sebagai pelaku ekonomi di tingkat lokal belum menjadi fokus utama (Puspa Unsyh Shaleha, 2024).

Pedagang kecil memiliki posisi penting untuk dikaji karena keberlangsungan usaha mereka berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah mengenai pasar, fasilitas perdagangan, permodalan, serta pembangunan dan pemugaran pasar. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokuskan kajian pada dampak kebijakan ekonomi Orde Baru terhadap pedagang kecil. Penelitian ini tidak hanya melihat kebijakan dari sisi tujuan dan pelaksanaannya, tetapi juga mengkaji bagaimana perubahan kebijakan tersebut memengaruhi kondisi ekonomi, ruang usaha, aktivitas perdagangan, dan keberlangsungan usaha pedagang kecil di tingkat lokal.

Berikutnya penelitian Rizki Rahmawati (2022) berjudul "Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru" membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai instrumen utama pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Penelitian tersebut menguraikan perkembangan Repelita I hingga Repelita VI beserta perubahan sasaran pembangunan pada setiap tahapnya. Salah satu fokus yang ditunjukkan adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, termasuk pemberian bantuan kepada pengusaha kecil dan masyarakat golongan ekonomi lemah (Rizki Rahmawati, 2022).

Penelitian tersebut masih menempatkan Repelita dalam kerangka pembangunan nasional secara umum dan belum secara khusus mengkaji bagaimana kebijakan pembangunan tersebut berdampak terhadap kehidupan pedagang kecil pada tingkat lokal. Terdapat ruang kajian untuk melihat kebijakan ekonomi Orde Baru dari perspektif masyarakat sebagai pelaku ekonomi, khususnya pedagang kecil yang secara langsung berhadapan dengan perubahan kebijakan, pembangunan, dan pengaturan kegiatan perdagangan. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan memfokuskan kajian pada dampak kebijakan Orde Baru terhadap pedagang, sehingga dapat memperlihatkan hubungan antara kebijakan pembangunan pada tingkat nasional dengan perubahan kondisi ekonomi dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil di tingkat lokal.

Selanjutnya tulisan dengan judul "Pengaruh Revitalisasi Pasar terhadap Aktivitas Pedagang di Pasar Klewer Kota Surakarta" karya William Chrysostom Gonta (2017) mengkaji dampak revitalisasi Pasar Klewer terhadap aktivitas perdagangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi memberikan perubahan terhadap kondisi pasar

dan aktivitas pedagang, dengan dampak positif berupa kondisi fisik pasar yang semakin nyaman, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa penurunan pada beberapa aktivitas perdagangan pedagang setelah revitalisasi. Kajian tersebut memberikan gambaran bahwa perubahan kebijakan dan pembangunan pasar dapat berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan ekonomi pedagang di Surakarta (William Chrysostom Gonta, 2017).

Penelitian tersebut berfokus pada revitalisasi Pasar Klewer yang berlangsung pada 2015–2017, sehingga belum menempatkan perubahan aktivitas pedagang dalam konteks kebijakan ekonomi Orde Baru dan perkembangan pembangunan pasar pada periode 1966–1998. Terdapat ruang kajian untuk menelusuri bagaimana kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dirumuskan pemerintah Orde Baru sejak masa awal pemerintahannya berpengaruh terhadap keberadaan dan keberlangsungan pedagang kecil di Surakarta. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan mengkaji dampak kebijakan Orde Baru terhadap pedagang kecil, terutama melalui kebijakan pembangunan, perkreditan, perdagangan, serta pembangunan dan pemugaran pasar, sehingga dapat memperlihatkan hubungan antara kebijakan ekonomi pemerintah dengan kehidupan ekonomi pedagang kecil dalam perspektif sejarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah sosial-ekonomi untuk mengkaji dampak kebijakan Orde Baru terhadap pedagang kecil. Proses penelitian dilakukan melalui lima tahapan pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder, berupa peraturan dan kebijakan pemerintah, arsip, dan surat kabar serta buku dan jurnal yang relevan. Kritik sumber dilakukan menguji keaslian dan kredibilitas informasi melalui kritik ekstren dan intern. Fakta-fakta yang telah terverifikasi kemudian diinterpetasikan dengan menghubungkan kebijakan ekonomi pemerintah dengan perubahan kondisi dan aktivitas para pedagang. Tahap terakhir adalah historiografi menyusun hasil penelitian secara kronologis dan analitis untuk menjelaskan

perkembangan kebijakan Orde Baru serta pengaruhnya terhadap ruang usaha, aktivitas perdagangan, dan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mempengaruhi Keberlangsungan Usaha Pedagang Kecil Di Indonesia

Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya meningkatkan peranan kelompok ekonomi lemah dalam kegiatan perekonomian melalui berbagai kebijakan yang ditunjukan kepada pedagang kecil. Pedagang kecil atau bakul memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kegiatan perdagangan sehari-hari (Mulismin A.R. effendi (ed), 2024). Keterbatasan modal menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat perkembangan usaha pedagang kecil. mengembangkan kebijakan perkreditan yang memberikan tambahan modal kerja kepada pedagang kecil dengan persyaratan yang lebih ringan. Pemerintah mewujudkan upaya tersebut melalui Program Kredit Candak Kulak (KCK) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 (Inpres No.4 Tahun 1979). Program tersebut memberikan akses kepada pedagang kecil untuk memperoleh sumber pembiayaan yang dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha. Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pedagang kecil agar mereka dapat mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Kredit Candak Kulak (KCK) pada awalnya muncul dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat pedesaan, terutama persoalan keterbatasan modal yang dihadapi para pedagang kecil atau bakul (Mayora Dwi Paragya Putri, & Yuda Benharry Tangkilisan, 2018). Gagasan mengenai program tersebut dibahas dalam sebuah pertemuan pada Maret 1976 yang membicarakan berbagai persoalan ekonomi masyarakat pedesaan. Dari pertemuan tersebut muncul beberapa gagasan untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat desa, salah satunya melalui pemberian kredit bagi pedagang kecil. Gagasan Kredit Candak Kulak (KCK) selanjutnya diwujudkan melalui proyek perintis yang mulai dilaksanakan pada 13 April 1976 di tiga desa di Kecamatan Tengen, Kabupaten Sragen (Suara Karya, 1976). Pelaksanaan proyek perintis tersebut menjadi tahap awal perkembangan Kredit Candak Kulak (KCK) sebelum kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

tentang Program Perkreditan Candak Kulak (Inpres No. 4 Tahun 1979). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kredit Candak Kulak (KCK) berawal dari upaya mencari solusi terhadap persoalan permodalan masyarakat pedesaan dan kemudian berkembang menjadi bagian dari kebijakan perkreditan pemerintah Orde Baru.

Pemerintah Orde Baru juga berupaya menunjang keberlangsungan usaha pedagang kecil melalui penyediaan tempat berjualan. Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan pembangunan dan pemugaran pasar yang mulai ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 (Inpres No. 15 Tahun 1979). Dalam pertimbangannya, pemerintah menyatakan bahwa pembangunan dan pemugaran pasar diperlukan untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya pedagang kecil golongan ekonomi lemah. Pemerintah juga mempertimbangkan agar sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin melalu penyediaan dana kredit dengan persyarakatan ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pedagang kecil tidak hanya diarahkan pada persoalan permodalan, tetapi juga pada penyediaan tempat usaha yang layak dan terjangkau untuk mendukung kegiatan perdagangan.

Upaya tersebut tidak berhenti pada tahun 1979/1980, tetapi terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari terbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981 (Inpres No.9 Tahun 1980). Kebijakan serupa kembali diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 Pada tahun berikutnya, pemerintah kembali mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984. Meskipun diterbitkan dalam tahun anggaran yang berbeda, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki pertimbangan yang serupa, yaitu menyediakan tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya pedagang kecil golongan ekonomi lemah, serta memungkinkan sewa pasar ditetapkan semurah mungkin melalui dana kredit dengan persyaratan ringan

Keberlangsungan usaha pedagang kecil pada masa Orde Baru tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menyentuh aspek permodalan dan penyediaan tempat usaha. Kredit Candak Kulak (KCK) diarahkan untuk mengatasi persoalan keterbatasan modal

kerja melalui pemberian kredit dengan persyaratan yang relative ringan bagi pedagang kecil. Di sisi lain, pembangunan dan pemugaran pasar berkaitan dengan kebutuhan pedagang terhadap ruang usaha yang layak dan terjangkau. Kedua kebijakan tersebut memperlihatkan adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi pedagang kecil dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Dukungan permodalan memberikan peluang bagi pedagang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, sedangkan penyediaan dan pembenahan pasar memberikan euang bagi berlangsungnya aktivitas perdagangan. Kebijakan terhadap pedagang kecil pada masa Orde Baru mencakup aspek ekonomi sekaligus penyediaan fasilitas perdagangan. Keberadaan kebijakan tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan perubahan kondisi ekonomi pedagang, sebab penerapannya di tingkat daerah serta kemampuan pedagang dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia turut menentukaan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha mereka.

Bentuk Kebijakan Ekonomi Orde Baru Yang Berdampak Langsung Terhadap Pedagang Kecil

Kebijakan ekonomi Orde Baru yang ditujukan secara langsung kepada pedagang kecil adalah Program Perkreditan Candak Kulak (KCK). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979, Kredit Candak Kulak (KCK) merupakan pemberian bantuan modal kerja dalam benuk kredit dengan persyaratan ringan kepada pedagang kecil atau bakul, terutama yang berada di masyarakat pedesaan, melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, mendukung produksi dan pemasaran serta pengadaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Kredit Candak Kulak (KCK) secara khusus dirancang sebagai kebijakan perkreditan yang menyediakan modal kerja bagi pedagang kecil melalui Lembaga koperasi (Inpres No.4 Tahun 1979).

Kemudahan akses menjadi salah satu ciri utama dalam pelaksanaan Kredit Candak Kulak (KCK). Pedagang kecil dapat memperoleh kredit dengan jumlah maksimal Rp 15.000 tanpa harus memberikan jainan kekayaan. Jangka waktu pinjaman ditetapkan paling lama tiga bulan dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan secara harian, pasaran, mingguan, bulanan, atau selapanan. Penerima kredit akan dikenakan bunga sebesar 1% per bulan tanpa dibebani biaya lainnya, dan dana yang diperoleh hanya

diperuntukkan sebagai modal kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan persyaratan kredit dengan karakteristik kegiatan perdagangan pedagang kecil yang membutuhkan perputaran modal dalam waktu relatif singkat (Inpres No.4 Tahun 1979).

Pelaksanaa Kredit Candak Kulak (KCK) melibatkan mekanisme kelembagaan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). sebagai Lembaga yang berperan dalam penyaluran dan pengelolaan dana program. Dana Kredit Candak Kulak (KCK) berasal dari APBN dalam bentuk penyertaan modal pemerintah yang bersifat *revolving*, kemudian ditempatkan sebagai dana likuiditas bagi Koperasi Unit Desa (KUD) dalam melaksanakan program. penyaluran dana dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Koperasi Unit Desa (KUD). Di samping penyediaan dana, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk kegiatan penerangan, penyuluhan, pendidikan, dan latihan pembinaan, serta pengawasan program. susunan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa Kredit Candak Kulak (KCK) dirancang sebagai program perkreditan yang menempatkan koperasi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan modal pedagang kecil. Keterlibatan koperasi sekaligus memungkinkan pembinaan dan pengawasan, sehingga pelaksanaan program tidak berhenti pada penyediaan modal, tetapi mencakup proses pendampingan terhadap penerimaan kredit (Inpres No.4 Tahun 1979).

Selain kebijakan Kredit Candak Kulak (KCK), pemerintah Orde Baru memberikan dukungan kepada pedagang kecil melalui Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar. Kebijakan ini pertama kali ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menyediakan kredit dengan peryaratan ringan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemugaran pasar. Bantuan tersebut terutama ditujukan untuk menyediakan tempat berjualan bagi pedagang kecil golongan ekonomi lemah serta memungkinkan penetapan sewa pasar dengan harga semurah mungkin (Inpres No.15 Tahun 1979). Kebijakan ini kemudian dilanjutkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980. Nomor 8 Tahun 1981. Nomor 7 Tahun 1982. Nomor 10 Tahun 1983 untuk tahun anggaran berikutnya. Keberlanjutan kebijakan selama beberapa tahun menunjukkan bahwa penyediaan sarana

perdagangan menjadi salah satu bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung keberadaan pedagang kecil. Dengan menempatkan pembangunan pasar sebagai bagian dari program bantuan, persoalan pedagang kecil tidak hanya dilihat dari keterbatasan modal, tetapi juga dari kebutuhan terhadap tempat usaha yang dapat digunakan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, bantuan tersebut tidak semata-mata diarahkan pada pembangunan fisik pasar, tetapi juga memperlihatkan kemampuan pedagang kecil dalam meperoleh dan mempertahankan tempat usaha. Pedoman pelaksanaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar mengatur bentuk dan konstruksi bangunan, tata letak, serta jenis ruangan pasar agar biaya pembangunan dapat ditekan sehingga sewa setiap ruangan dapat ditetapkan semurah mungkin. Pengaturan penyewaan juga mempertimbangkan kepentingan pedagang kecil golongan ekonomi lemah agar mereka dapat memperoleh tempat yang layak untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Ketentutan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pasar memiliki konsekuensi langsung terhadap akses pedagang kecil terhadap ruang ekonomi. Pembangunan sarana perdagangan dalam kebijakan ini tidak berhenti pada penyediaan bangunan, melainkan juga berusaha menjaga agar biaya penggunaan ruang tersebut tetap berada dalam jangkauan pedagang yang menjadi sasaran program. hal ini penting karena tersedianya pasar secara fisik belum tentu memberikan manfaat bagi pedagang apabila biaya untuk memperoleh tempat usaha justru terlalu tinggi.

Dukungan pemerintah juga terlihat dari pola pembiayaan program yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada tahun anggaran 1980/1981 pemeritah menyediakan bantuan kredit sebesar Rp 45 Miliar dengan jangka waktu pinjam dua tahun, dan bunga sebesar 0% per tahun (Inpres No.9 Tahun 1980). Pada tahun anggaran 1981/1982 jumlah bantuan meningkat menjadi Rp 50 Miliar dengan jangka waktu pinjaman lima belas tahun, termasuk masa tenggang lima tahun, dan tetap tanpa bunga (Inpres No.8 Tahun 1981). Skema tersebut memberikan ruang yang cukup panjang bagi pemerintah daerah untukmelaksanakan pembangunan dan pemugaran pasar tanpa beban bunga pinjaman. Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah memiliki tangung jawab atas pembangunan, pengawasan, pengelolaan pasar, serta penyewaan ruang kepada

pedagang sesuai dengan tujuan program. kebijakan tersebut membentuk pola hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pedagang kecil.

Dampak Kebijakan Orde Baru Terhadap Bagi Pedagang Kecil di Surakarta

Pelaksanaan Program Kredit Candak Kulak (KCK) menunjukkan adanya pengaruh terhadap keberlangsungan usaha pedagang kecil, terutama melalui kemudahan memperoleh tambahan modal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Kredit Candak Kulak (KCK) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, pedagang dapat memperoleh kredit melalui Koperasi Unit Desa (KUD)tanpa jaminan dengan jumlah pinjaman relatif kecil dan bunga yang ringan. Kemudahan tersebut memungkinkan kredit digunakan sebagai tambahan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Salah seorang nasabah, bapak Anang menggunakan kredit sebesar Rp 20.000 untuk memperbesar usaha jual beli botol kosong. Dengan tambahan modal tersebut, dapat memoerluas kegiatan usahanya hingga menjangkau wilayah Palembang. Penggunaan kredit sebagai tambahan modal menunjukkan bahwa Kredit Candak Kulak (KCK) dapat membantu pedagang kecil mempertahankan sekaligus mengembangkan kegiatan usaha meskipun dalam skala terbatas (Suara Karya, 1980).

Manfaat Kredit Candak Kulak (KCK) terhadap keberlangsungan usaha juga terlihat dari pengalaman Maliki, salah seorang nasabah KUD Pelita Massa. Menyatakan bahwa tanpa bantuan Kredit Candak Kulak (KCK), usaha yang dijalankannya akan sulit berkembang. Kresit yang diterimanya digunakan untuk membeli makan ternak ayam dan itik, sementara hasil peternakan tersebut sebagian dikonsumsi dan sebagian dijual. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Kredit Candak Kulak (KCK) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha produktif sekaligus membantu masyrakat memperoleh sumber pndapatan tambahan. Namun demikian, pelaksanaan Kredit Candak Kulak (KCK) juga mengalami keterbatasan. Ketua KUD Pelita Massa menyampaikan bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat belum sepenunya dapat dipenuhi karena KUD belum mampu memberikan kredit dalam jumlah yang lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kredit Candak Kulak (KCK) memberikan akses permodalan bagi pedagang dan pelaku usaha kecil, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan modal masih memiliki batas tertentu (Suara Karya, 1980).

Dampak kebijakan perkreditan pemerintah terhdap pedagang kecil terlihat dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap sumber modal usaha. Pelaksanaan Kredit Candak Kulak (KCK) di Kabupaten Lombok Timur, telah menjangkau 5.048 pedagang kecil, seperti pedagang bakulan, pedagang rombong es, dan pedagang kopi. Kehadiran Kredit Candak Kulak (KCK) mendapat sambutan positif dari para pedagang karena memberikan alternatif sumber pembiayaan yang lebih ringan dibandingkan pinjaman yang sebelumnya mereka gunakan. Sejumlah pedagang menyatakan bahwa keberadaan Kredit Candak Kulak (KCK) membantu mereka keluar dari ketergantungan terhadap pinjaman dengan bunga tinggi, yang sebelumnya dapat mencapai paling rendah 20% (Berita Yudha, 1982).

Pengaruh Kredit Candak Kulak (KCK) terhadap kegiatan ekonomi masyarakat juga terlihat dari adanya perputaran modal yang cukup besar dibadingkan dengan modal awal yang disalurkan. Di Lombok Timur, modal kerja yang pada awalnya disalurkan melalui KUD tercatat sebesar Rp 29,5 juta, sedangkan jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan kepada nasabah mencapai lebih dari Rp 279,9 juta. Perputaran tersebut menunjukkan bahwa dana Kredit Candak Kulak (KCK) tidak berhenti pada penerima kredit pertama, tetapi dapat kembali dan disalurkan kepada pedagang atau nasabah lainnya (Berita Yudha, 1982). Mekanisme kredit yang bersifat berulang memungkinkan modal yang disediakan pemerintah memberikan manfaat kepada lebih banyak pelaku usaha kecil.

Jangkauan Kredit Candak Kulak (KCK) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh pedagang yang ada. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri jumlah pedagang bakulan dan pedagang sejenisnya diperkirakan mencapai sekitar 56.000 orang, sedangkan penerima Kredit Candak Kulak (KCK) yang tercatat berjumalah 5.048 orang (Berita Yudha, 1982). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar pedagang kecil yang belum memperoleh akses terhadap program tersebut. Kondisi inni memperlihatkan bahwa persoalan Kredit Candak Kulak (KCK) tidak hanya berkaitan dengan manfaat kredit bagi penerimanya, tetapi juga dengan sejauh mana program tersebut mampu menjangkau kelompok pedagang yang menjadi sasaran kebijakan. Meskipun aksesnya belum mencakup seluruh pedagang, pengalaman penerima

Kredit Candak Kulak (KCK) di berbagai daerah dapat memberikan gambaran mengenai manfaat program terssebut terhadap kegiatan usaha pedagang kecil.

Dukungan pemerintah terhadap pedagang kecil tidak hanya berhenti pada penyediaan modal usaha, tetapi juga dilakukan melalui pembangunan dan pemugaran sarana perdagangan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar yang mulai dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980. Program ini menyediakan kredit dengan syarat ringan kepada pemerintah daerah untuk membangun dan memugarkan pasar. Tujuannya tidak hanya menyediakan tempat berjualan bagi pedagang kecil golongan ekonomi lemah, tetapi juga memungkinkan penetapan sewa pasar semurah mungkin sehingga pedagang kecil memperoleh tempat yang layak untuk menjalankan kegiatan perdagangan (Inpres No.15 Tahun 1979). Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982, dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1983, dengan ketentuan yang terus disesuaikan dalam pelaksanaanya.

Pelaksanaan pembangunan pasar melalui program tersebut memberikan dampak berupa bertambahnya ruang usaha yang dapat digunakan oleh pedagang kecil. Pembangunan pasar Inpres di Kabupaten Ogan Komering Ilir, menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan menghasilkan ribuan los dan ratusan kios yang mampu menampung ribuan pedagang. Pembangunan pasar tersebut juga diarahkan untuk mendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pasar tidak hanya berfungsi sebagai pembangunan fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk menyediakan tempat usaha dan memperlancar kegiatan perdagangan masyarakat (Berita Yudha, 1983).

Pembangunan dan Pemugaran Pasar tidak selalu memberikan dampak yang sepenuhnya positif bagi pedagang kecil. Pemberitaan mengenai pemugaran pasar di Bali menunjukkan adaya pedagang yang mengalamai penurunan pemasukan setelah pasar mengalami perubahan fisik. Kondisi tersebut antara lain disebebkan oleh posisi tempat usaha yang dianggap kurang terlihat dari jalan sehingga sebagian pembeli memiliki berbelanja di lokasi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemugaran pasar dapat

memengaruhi pola aktivitas perdagangan apabila perubahan fisik tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebiasaan pedagang dan akses konsumen. Keberhasilan pembangunan pasar tidak cukup diukur dari terselesaikannya pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pasar dalam mempertahankan keberlangsungan usaha pedagang yang menempatinya (Bali Pos, 1989).

Di Surakarta, pembangunan sarana pedagangan juga menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan pemberitaan mengenai peresmian proyek pembangunan di kotamadya Surakarta pada tahun anggaran 1988/1989, terdapat berbagai proyek pembangunan dengan nilai keseluruhan lebih dari Rp 12,5 miliar. Di antara proyek tersebut terdapat dua proyek bantuan pasar yang termasuk dalam kelompok proyek Instruksi Presiden, dengan nilai mencapai Rp 125 juta. Keberadaan proyek bantuan pasar tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas perdagangan masih menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan pemerintah di Surakarta pada akhir 1980-an (Harian Neraca, 1989).

Informasi mengenai bantuan pembangunan pasar di Surakarta menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam pengembangan sarana perdagangan pada masa Orde Baru. Meskipun demikian, sumber tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai pasar yang memperoleh bantuan maupun perubahan yang terjadi terhadap kondisi pedagang setelah proyek pembangunan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan Orde Baru mengenai pembangunan dan pemugaran pasar, proyek tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan penyediaan sarana perdagangan di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan daerah. Namun, sumber tersebut belum memadai untuk mengukur dampak pembangunan pasar terhadap kondisi usaha pedagang kecil.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah Orde Baru memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan usaha pedagang kecil melalui dua aspek utama, yaitu permodalan dan penyediaan tempat usaha. Program Kredit Candak Kulak (KCK) memberikan akses modal dengan persyaratan relatif ringan sehingga membantu sebagian pedagang mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sementara itu, pembangunan dan pemugaran pasar

menyediakan ruang berdagang yang layak dan terjangkau bagi pedagang kecil. Meskipun manfaatnya belum sepenuhnya merata karena keterbatasan jangkauan kredit, kemampuan lembaga penyalur, serta kondisi pelaksanaan di masing-masing daerah, keberadaan proyek bantuan pasar di Surakarta pada akhir 1980-an menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pedagang kecil turut diterjemahkan dalam pembangunan sarana perdagangan di tingkat daerah.

Keberlangsungan usaha pedagang kecil pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menjalankan usaha, tetapi juga oleh terbukanya akses terhadap modal dan ruang perdagangan. Keberadaan KCK dan pembangunan pasar menunjukkan upaya pemerintah menciptakan ruang ekonomi agar pedagang kecil dapat bertahan dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Surakarta menjadi salah satu gambaran bahwa kebijakan ekonomi nasional dapat hadir hingga tingkat lokal melalui pembangunan sarana perdagangan, meskipun dampak langsungnya terhadap kondisi pedagang masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Keberhasilan sebuah kebijakan bukan sekadar tentang berapa banyak kredit yang disalurkan atau pasar yang dibangun, tetapi tentang sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberi pedagang kecil modal untuk bergerak, tempat untuk berdagang, dan kesempatan untuk tetap bertahan

REFERENSI

Ashar, K. (2011). Analisis terhadap kesinambungan lembaga pembiayaan pedesaan dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. *Journal of Indonesian Applied Economics, 5*(1).

Effendy, M. A. R. (Ed.). (2024). *Historiografi Indonesia*. Cipta Media Nusantara.

Gonta, W. C. (2017). Pengaruh revitalisasi pasar terhadap aktivitas pedagang di Pasar Klewer Kota Surakarta. *Cakra Wisata, 18*(2).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2015). *Manual pelatihan dasar HAM: Pegangan partisipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2015*. Komnas HAM.

Mahdi, I. (2017). Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-Garis Besar Haluan Negara. *Al-Imarah, 2*(1).

Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan, 10*(1).

Paragya Putri, M. D., & Tangkilisan, Y. B. (2018). Program Kredit Candak Kulak: Kredit untuk sektor non pertanian tahun 1976–1979. *International Young Scholars Symposium on Humanities and Art*.

Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah pembangunan nasional di era Orde Baru. *Etnohistori, 9*(2).

Rajab, B. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di atas sistem ekonomi dan politik yang rapuh. *Jurnal Sosiohumaniora, 6*(3).

Romarina, A., dkk. (2024). *Perencanaan pembangunan daerah*. Deepublish Digital.

Sandy, D. (2020). *Narasi catatan penggugah jiwa seorang mahasiswa Sriwijaya*. Guepedia.

Shaleha, P. U., dkk. (2024). Sejarah perkembangan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dan pengaruh krisis moneter terhadap perekonomian Indonesia. *Analisis Sejarah, 14*(2).

Shulchi, L. A. (2016). Kebijakan pemerintah dalam sorotan pers Indonesia 1967–1974. *Avatara, 4*(3).

Sibuea, H. P., & Wijanarko, D. S. (2020). *Dinamika negara hukum*. Rajagrafindo Persada.

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan publik: Pendelegasian tanggungjawab negara kepada Presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Universitas Moestopo Beragama Pers.

Yunus, M., dkk. (2025). *Pemikiran dan tradisi perekonomian di Indonesia*. USK Press.

Peraturan dan Dokumen Pemerintah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak. (1979).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1979 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980. (1979).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981. (1980).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982. (1981).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983. (1982).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984. (1983).

Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. (1966).

Surat Kabar

Bali Pos. (1989, 22 Januari).

Berita Yudha. (1982, 18 Januari).

Berita Yudha. (1983, 28 Maret).

Harian Neraca. (1989, 27 Maret).

Suara Karya. (1976, 12 Agustus).

Suara Karya. (1980, 16 Agustus).